

**AKUNTABILITAS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WADUK  
JATIBARANG DI KOTA SEMARANG**

**Oleh: Zulfi Trio Pramono, Ari Subowo**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693**

**Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405**

**Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**Abstrak**

*Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang merupakan suatu bentuk upaya, inisiatif Pemerintah Kota Semarang dan dibantu oleh Pemerintah Pusat bertujuan menanggulangi masalah banjir di Kota Semarang. Hal tersebut karena dilatarbelakangi dengan adanya musibah banjir dari tahun 1973-2002 yang telah memberikan banyak kerugian bagi masyarakat Kota Semarang. Namun kebijakan pembangunan Waduk Jatibarang dalam pelaksanaan pembangunannya mengalami sebuah masalah keterlambatan penyelesaian pembangunan waduk dari target yang telah ditetapkan.*

*Berdasarkan masalah yang terjadi pada pembangunan Waduk Jatibarang kemudian muncul sebuah pertanyaan tentang bagaimana akuntabilitas dari perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang. Hal tersebut dikaji melalui pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Bappeda Kota Semarang, Kelurahan Kandri dan Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada informan, studi dokumentasi, dan studi pustaka.*

*Hasilnya adalah meskipun sudah masuk dalam kriteria akuntabel, namun perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang terdapat cukup banyak catatan seperti dalam dimensi diskusi publik yakni sosialisasi hanya bersifat informatif, hanya dilakukan kepada warga terkena dampak, dan tidak sampai menghimpun aspirasi masyarakat pada tingkat substansi perencanaan. Kemudian pada dimensi koordinasi belum ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dan tertulis, selanjutnya dimensi publikasi dan kampanye edukatif dimana kampanye edukatif tentang dampak-dampak dari pembangunan Waduk Jatibarang hanya ditujukan kepada warga terkena dampak. Maka disarankan agar melakukan diskusi publik yang ditujukan kepada masyarakat di empat kelurahan yang menjadi bagian lokasi pembangunan waduk secara luas dengan menghimpun aspirasi dari masyarakat, kemudian memperbaiki pembagian tugas dan kewenangan agar lebih jelas dan dalam bentuk tertulis. Dan yang terakhir kampanye edukatif dapat dilakukan terhadap masyarakat Kota Semarang secara luas.*

**Keywords: Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang, Akuntabilitas, Perencanaan**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kota Semarang merupakan sebuah kota yang setiap tahun mengalami perkembangan dan pembangunan yang begitu pesat serta tumbuh menjadi sebuah kota metropolitan. Didukung dengan posisinya sebagai titik simpul dan *transit point regional* yang menjadikan Kota Semarang terus berkembang sebagai simpul jasa dan

distribusi serta gerbang menuju wilayah lainnya. Akan tetapi pertumbuhan tersebut menjadi ironis ketika daya dukung lingkungannya lemah. Akibat dari pesatnya pembangunan ini maka semakin banyak lahan yang tertutup jalan dan bangunan lainnya, sehingga air yang meresap ke dalam tanah berkurang. Setiap tahun Kota Semarang mengalami banjir genangan pada musim hujan dan kesulitan

mendapatkan air bersih pada musim kemarau. Bahkan sangat rentan dengan terjadinya banjir bandang periode seratus tahunan. Pada periode 1973 hingga 2002, banjir bandang terjadi 4 kali. Banjir ini meninggalkan banyak kerugian secara finansial maupun jiwa. Sebut saja seperti banjir bandang yang terjadi tahun 1990, dimana karena meluapnya Kali Garang dan sungai-sungai lain yang ada di Kota Semarang sehingga menewaskan 47 orang, merobohkan 126 rumah, merusak 15 fasilitas umum dan kerugian sebesar Rp. 8,5 milyar (pada saat itu). Demikian juga banjir yang terjadi tahun 1993, korban jiwa yang tercatat berjumlah 60 orang, kerusakan rumah 145 dan estimasinya biaya sebesar Rp. 6,9 M (Sutomo: 2011).

Dengan keadaan Kota Semarang yang memiliki permasalahan banjir yang cukup serius tersebut, sehingga pada tahun 1990 Pemerintah Indonesia mengajukan bantuan teknis ke Jepang untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Apalagi banjir yang terjadi tahun 1973 hingga

1993 bersumber dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sama, yakni DAS Kali Garang.. Hingga semua kajian selesai dan dinyatakan layak dibantu, maka tahun 2006 kesepakatan pengajuan bantuan teknis dalam bentuk pinjaman dilakukan. Perjanjian ini dikenal dengan IP Loan – 534 untuk kegiatan *Integrated Water Resources and Flood Management Project for Semarang (IWRFM)* dengan 3 proyek pengerjaan yakni normalisasi Banjir Kanal Barat/Kali Garang (Paket A), pembangunan bendungan serbaguna Jatibarang (Paket B), dan perbaikan sistem drainase Kota Semarang (Paket C). Ketiga proyek tersebut direncanakan akan mulai dibangun sejak tahun 2009 hingga tahun 2013.

Namun dalam proses pembangunannya Waduk Jatibarang ternyata tidak berjalan dengan lancar sesuai harapan, ada beberapa hal yang menyebabkan proses pembangunan Waduk Jatibarang ini tidak sesuai harapan atau tidak tepat waktu. Seperti dilansir oleh harian elektronik Tribun Jateng edisi 14 April 2013 yang menerangkan

prediksi tentang Penyelesaian Pembangunan Waduk Jatibarang yang terancam molor. Hal tersebut seperti yang termuat dalam harian elektronik Suara Merdeka edisi 19 Maret 2012 yang mengutip bahwa *“Dari 226,73 hektare lahan yang dibutuhkan untuk Waduk Jatibarang, sampai saat ini masih ada 12,58 hektare atau 5,54 persen yang belum dibebaskan. Karena warga terus menolak ganti rugi, pemerintah akan menempuh jalan konsinyasi di pengadilan dengan perkiraan anggaran Rp 16,625 miliar. Sejauh ini pekerjaan telah berjalan 39 persen dan diharapkan dapat memenuhi target penyelesaian pada pertengahan 2013”*. Hal tersebut menunjukkan adanya kendala dalam proses pengadaan tanah yang turut mengambat proyek pembangunan Waduk Jatibarang. Kemudian terkait permasalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan Waduk Jatibarang juga dikuatkan dalam harian elektronik Tribun Jateng edisi 14 April 2013 dan Suara Merdeka edisi 16 November 2013 yang menjelaskan bahwa Pembangunan Waduk Jatibarang di Kecamatan

Gunungpati hingga per 23 Oktober 2013 telah mencapai perkembangan sampai 91,1% dengan elevasi *main dam* 147 meter dari target 157 meter. Sementara untuk proses penggenangan waduk berkapasitas 20,4 juta m<sup>3</sup> yang diperkirakan dilaksanakan sekitar pertengahan November, mundur pada pertengahan Desember. mundurnya proses penggenangan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yakni adanya perbaikan fondasi, berkurangnya musim kering, dan relokasi tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA yang belum selesai. Sementara untuk relokasi tujuh tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA di wilayah genangan menjadi 12 tower, masih ada dua titik tower baru di daerah Perhutani yang masih dalam proses dan belum selesai. Relokasi tower ini diperkirakan selesai pada November dan dilanjutkan dengan penarikan kabel listrik oleh pihak PLN.

Permasalahan yang terjadi pada pembangunan Waduk Jatibarang tersebut termasuk

mengenai keterlambatan penyelesaian konstruksi fisik dari Waduk Jatibarang tentu membawa beberapa kerugian baik secara materi maupun waktu atau kerugian lain secara tidak langsung. Hal tersebut perlu dicermati tentang bagaimana akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang. Karena keberhasilan melaksanakan proyek konstruksi yang tepat waktu adalah salah satu tujuan terpenting bagi pihak pemilik maupun kontraktor, sehingga setiap kegiatan proyek perlu direncanakan dan dilaksanakan sistem pengawasan dan pengendalian yang teratur, agar diperoleh hasil akhir dengan kualitas dan kuantitas yang memenuhi sasaran (Waluyo, Rudi. 2009 : 153). Sehingga merujuk pernyataan tersebut perlu ditelaah bagaimana akuntabilitas dari perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang melalui kajian yang lebih dalam.

Konsep *Good Governance* seharusnya diterapkan pada perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang agar pelaksanaan pembangunan Waduk Jatibarang

tersebut dapat berjalan dengan baik, dan agar pembangunan Waduk Jatibarang tidak menyimpang dari kepentingan publik perlu diciptakan suasana *Good Governance* dalam administrasi publik (Suwitri, 2011: 12). Maka prinsip akuntabilitas menjadi salah satu pilar dalam konsep *good governance* harus diterapkan dengan baik. Sehingga muncul sebuah rumusan masalah yakni bagaimana akuntabilitas dalam kebijakan pembangunan Waduk Jatibarang?

## **B. TUJUAN**

Menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang.

## **C. TEORI**

Plumptre T. (1981) dalam artikelnya "*Perspective Accountability in The Public Sector*" (dalam LAN, 2000: 35-37) memberikan tuntutan untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas yaitu: (a) *Public Debate* (Diskusi Publik), (b) *Coordination* (Koordinasi), (c) *Legitimacy and acceptance* (Legitimasi dan

Penerimaan), (d) *Educational campaign and publicity* (Kampanye Edukatif & Publikasi), dan (e) *Feedback and evaluation* (Umpan balik & Evaluasi).

#### D. METODE

**Desain Penelitian.** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni Penelitian Deskriptif.

**Situs Penelitian.** Lokasi atau wilayah yang diambil adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Satuan Non Struktural Vertikal Tertentu (SNVT) Waduk Jatibarang, Bappeda Kota Semarang, Kelurahan Kedungpane dan Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen, serta Kelurahan Kandri dan Jatirejo Kecamatan Gunungpati.

**Subjek Penelitian.** Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik *snowball* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik *Snowball* digunakan pada tataran aktor perencanaan dalam instansi pemerintah terkait yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali – Juana dan

Bappeda Kota Semarang yang akan memandu siapa saja pihak yang terkait dan memahami secara mendalam tentang kebijakan pembangunan Waduk Jatibarang.

**Sumber Data.** Data Primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari informan. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari studi pustaka, dokumen-dokumen maupun dari penelitian sebelumnya.

**Teknik Pengumpulan Data.** Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu yang berasal dari wawancara, dari dokumen-dokumen maupun melalui pengamatan dilapangan.

**Analisis Data.** Dalam penelitian ini, tahapan yang dilakukan penulis dalam melakukan kegiatan analisis data dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu : (a) *Data Condensation* (Kondensasi Data); (b) *Data Display* (Penyajian Data); (c) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan).

## PEMBAHASAN

### A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam menganalisis akuntabilitas perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang ini menggunakan prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh Plumptre T. (1981) dalam artikelnya *"Perspective Accountability in The Public Sector"* (dalam LAN, 2000: 35-37) memberikan tuntutan untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas yaitu: (a) *Public Debate* (Diskusi Publik), (b) *Coordination* (Koordinasi), (c) *Legitimacy and acceptance* (Legitimasi dan Penerimaan), (d) *Educational campaign and publicity* (Kampanye Edukatif & Publikasi), dan (e) *Feedback and evaluation* (Umpan balik & Evaluasi).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut hasil analisis akuntabilitas dalam kebijakan pembangunan Waduk Jatibarang:

### **1. Diskusi Publik (*Public Debate*)**

Bentuk diskusi publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan pemerintah hanya bersifat informatif dan kurang interaktif, dimana pemerintah sebagai pihak yang melakukan sosialisasi

memberikan informasi kepada warga terkena dampak (WTD) tentang rencana, dan dampak dari pembangunan Waduk Jatibarang termasuk dampak pembebasan lahan warga untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan waduk. Namun pembangunan Waduk Jatibarang sebagai salah satu bentuk program/proyek pemerintah yang cukup besar dalam artian memiliki dampak sosial yang luas seharusnya banyak melakukan kegiatan seperti diskusi publik interaktif yang banyak menghimpun banyak masukan-masukan dari masyarakat untuk memperkaya kebijakan pembangunan Waduk Jatibarang tersebut.

Selanjutnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan Waduk Jatibarang juga hanya menysar kepada warga terkena dampak (WTD) yang lahannya dibebaskan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Waduk.

Dalam perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang pemerintah yang melakukan

sosialisasi memiliki tujuan yang kurang senada dengan apa yang dipaparkan oleh Plumtre. Seharusnya media sosialisasi tersebut selain sebagai media informatif juga harus dimanfaatkan sebagai wadah yang aspiratif yang dapat menghimpun aspirasi masyarakat terkait perencanaan sebuah program/proyek pemerintah. Nyatanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai rencana pembangunan Waduk Jatibarang hanya memuat tentang informasi rencana pembangunan Waduk, dampak pembangunan Waduk Jatibarang dan juga kesepakatan Harga.

Hal tersebut mempertegas bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah memanglah hanya sebagai media informatif dan minim interaksi antara pemerintah dengan warga.

## **2. Koordinasi (*Coordination*)**

Sistem koordinasi dibentuk dengan BBWS Pemali-Juana menjadi *leader sector* diikuti instansi terkait lainnya sebagai pendukung dan pengaya dalam perencanaan

pembangunan Waduk Jatibarang. BBWS Pemali-Juana memiliki tanggung jawab untuk membuat dan merancang *grand design* tentang pembangunan Waduk Jatibarang yang kemudian dikonsultasikan dengan instansi terkait lainnya dalam sebuah FGD yang diadakan oleh BBWS Pemali-Juana.

Kemudian bentuk kesepahaman antar instansi diwujudkan dalam MoU guna mengakomodir kepentingan masing-masing instansi. Contohnya adalah bentuk konsensus dalam koordinasi antar instansi sendiri dalam bentuk MoU, contoh MoU yang ada sendiri adalah MoU tentang *sharing* pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Jatibarang. MoU itu sendiri berbentuk dokumen Perjanjian Kerjasama No. TN.02.01/Ao.5.3/021 antara Pemerintah Pusat diwakili oleh BBWS Pemali-juana, kemudian Pemerintah Provinsi yang diwakili oleh Dinas PSDA Provinsi Jateng, kemudian Pemerintah Kota Semarang yang diwakili oleh Dinas PSDA Kota Semarang tentang Pengadaan tanah untuk mendukung

pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu dan pengelolaan banjir di Kota Semarang Loan IP-534.

Dalam perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang sendiri tidak terdapat konflik yang sangat menghambat jalannya proses perencanaan, hal tersebut juga karena dipengaruhi dengan adanya pengakomodiran kepentingan-kepentingan dari para *stakeholder* yang meliputi instansi terkait perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang. Dalam penyelesaian konflik sendiri juga dilakukan dengan mekanisme yang tidak rumit dan baik.

Namun dalam koordinasi yang terjadi dalam perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang tidak terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas apalagi tertulis, hal tersebut dapat membuat peluang terjadinya sebuah kekacauan dan konflik dalam koordinasi yang dilakukan. Hal ini jadi titik lemah dalam hal koordinasi di dalam perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang.

### **3. Legitimasi dan Penerimaan (*Legitimacy and Acceptance*)**

Penerimaan baik dari warga terkena dampak dan masyarakat Kota Semarang secara luas baik terhadap rencana pembangunan Waduk Jatibarang, meskipun terdapat kendala ketika proses pengadaan tanah terhadap warga terkena dampak yang tidak setuju dengan pembangunan Waduk Jatibarang namun dapat diselesaikan dengan baik.

### **4. Publikasi dan Kampanye Edukatif (*Publicity and Educational Campaign*)**

Media publikasi dari rencana pembangunan Waduk Jatibarang sendiri terdiri dari 2 jenis yakni media masa dan juga media sosialisasi terhadap masyarakat langsung. Media masa yang juga mewartakan mengenai rencana kebijakan pembangunan Waduk Jatibarang sendiri memang diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi warga Kota Semarang secara umum untuk mengetahui tentang rencana kebijakan pembangunan Waduk Jatibarang, sedangkan media

sosialisasi yang dilakukan di empat kelurahan yang berada pada kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Waduk Jatibarang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang rencana pembangunan Waduk Jatibarang kepada warga terkena dampak yang berada di empat kelurahan tersebut.

Kampanye yang dilakukan pemerintah melalui sosialisasi tentang rencana pembangunan Waduk Jatibarang hanya berlaku dan ditujukan kepada warga terkena dampak (WTD) dan tidak sampai menysasar masyarakat Kota Semarang secara umum sebagai komunitas sosial yang lebih besar yang juga mendapat dampak pembangunan Waduk Jatibarang meskipun tidak secara langsung. Sedangkan jika memperhatikan teori yang dikemukakan oleh Plumtre T. (1981) bahwa kampanye edukatif dilakukan dengan dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Penerimaan masyarakat akan suatu hal yang baru akan banyak dipengaruhi oleh

pemahaman masyarakat pada hal baru tersebut. Tanpa pengetahuan yang komprehensif akan membawa pada penerimaan yang bias (LAN, 2000: 35-37). Maka jelas bahwa kampanye edukatif seharusnya ditujukan kepada masyarakat secara umum guna mencerdaskan dan memberikan pemahaman yang komprehensif dengan harapan mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat. Jadi dapat dikatakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga terkena dampak (WTD) belum sesuai dengan apa yang termuat dalam teori yang dijelaskan oleh Plumtre T. tersebut.

## **5. Umpan Balik dan Evaluasi (*Feedback and Evaluastion*)**

pengumpulan informasi tentang bagaimana respon publik terhadap rencana pembangunan Waduk Jatibarang sendiri menurut penuturan dari pihak instansi terkait dilakukan melalui 2 cara yakni pertama melalui studi AMDAL. Studi AMDAL yang di dalamnya juga dilakukan studi tentang bagaimana tanggapan atau persepsi warga terhadap rencana kegiatan di dalam kebijakan pembangunan Waduk Jatibarang.

Contohnya tanggapan warga terhadap rencana relokasi SUTT dan juga pengambilan *quarry* di gunung Turun.

Melalui studi AMDAL yang dilakukan oleh BBWS Pemali-Juana dilakukan guna mendapatkan beberapa informasi termasuk di dalamnya bagaimana persepsi publik terhadap beberapa rencana di dalam pembangunan Waduk Jatibarang. Kemudian yang kedua, melalui studi LARAP yakni studi tentang pengadaan tanah dan juga *resettlement plan* untuk warga terkena dampak. Dalam studi LARAP yang dilakukan sendiri terdapat studi mengenai pengadaan tanah yang memiliki potensi dampak terhadap hilangnya mata pencaharian warga yang lahannya digunakan sebagai sumber mata pencaharian seperti bertani dan berladang.

Setelah mendapatkan informasi tersebut pemerintah kemudian melakukan evaluasi. Contohnya melalui studi AMDAL yang meninjau tentang bagaimana tanggapan warga tentang rencana kegiatan relokasi SUTT dan juga

pengambilan *quarry* di Gunung Turun, setelah mendapatkan berbagai respon warga seperti tanggapan setuju, tidak setuju, atau setuju dengan syarat maka hal tersebut menjadi tinjauan bagi pemerintah untuk menyempurnakan rencana tersebut.

Kemudian melalui metode yang kedua yakni studi LARAP pemerintah juga mencoba memetakan seberapa banyak pemilik lahan yang akan dibeli oleh pemerintah untuk pembangunan Waduk Jatibarang. Berdasarkan hasil perhitungan WTD yang penghasilannya hanya menggantungkan dari sektor pertanian sebanyak 167 orang atau 56,04 % dari total Warga Terkena Dampak (dalam Tesis Tri Andari Dahlan, 2007). Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi pemerintah untuk menyusun program pemulihan sosial bagi warga terkena dampak yang hanya bergantung pada lahan mereka yang nantinya akan dibeli pemerintah berdasarkan keinginan dan harapan warga terkena dampak.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Setelah dilakukan analisis akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang, perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang termasuk dalam kriteria akuntabel, namun perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang terdapat cukup banyak catatan seperti dalam dimensi diskusi publik yakni sosialisasi hanya bersifat informatif, hanya dilakukan kepada warga terkena dampak, dan tidak sampai menghimpun aspirasi masyarakat pada tingkat substansi perencanaan. Kemudian pada dimensi koordinasi belum ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dan tertulis, selanjutnya dimensi publikasi dan kampanye edukatif dimana kampanye edukatif tentang dampak-dampak dari rencana pembangunan Waduk Jatibarang hanya ditujukan kepada warga terkena dampak.

### **B. SARAN**

1. Diskusi publik yang dilakukan dalam perencanaan termasuk dalam perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang harus bersifat interaktif dan aspiratif dimana dalam diskusi

publik tersebut digunakan sebagai wahana penyerap aspirasi publik.

2. Diskusi Publik dalam bentuk sosialisasi di sebuah perencanaan termasuk dalam perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang haruslah menyerap aspirasi terkait substansi dari perencanaan bukan hanya sebagian kecil dalam agenda kebijakan tersebut seperti hanya tentang kesepakatan harga lahan saja.

3. Diskusi Publik dalam bentuk sosialisasi di sebuah perencanaan termasuk dalam perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang juga harus menysasar kepada komunitas sosial yang lebih luas tidak hanya warga terkena dampak saja.

4. Pembagian tugas dan kewenangan dalam perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang haruslah spesifik, jelas, dan tegas dengan tujuan agar tidak terdapat tumpang tindih / *overlapping* dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan terlebih agar mengeliminir terjadinya konflik yang terjadi dalam koordinasi

5. Media kampanye yang bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada publik seharusnya

dapat diwujudkan dalam bentuk yang lebih kreatif seperti lewat media masa, media elektronik, dan media lain agar publik mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai rencana yang dibuat oleh pemerintah termasuk pembangunan Waduk Jatibarang.

6. Kampanye edukatif yang dilakukan juga seharusnya atau lebih tepat menyasar kepada obyek yang lebih luas meliputi masyarakat Kota Semarang sebagai komunitas sosial yang mendapat dampak dari pembangunan Waduk Jatibarang walaupun tidak mendapatkan dampak secara langsung.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adhanani, Reny Agustine Nur. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Teritorial (Studi Komparasi: Borobudur dan Nantes)*. 9 (4): 355-367

Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

J. Kodoatie, Robert dan Sugiyanto. 2002. *Banjir: Beberapa*

*Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, & Isu*. Jogjakarta: Gava Media

LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN

Miles, Huberman & Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. USA: Sage Publication, Inc

Moleong, Lexy. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Karya Rosdakarya

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Prabowo , Eko Budi dan Yuli Bachtiar Rifai. 2005. *Perencanaan Penanggulangan Banjir Rob di Daerah Kelurahan Bandarharjo Semarang*. Undergraduate thesis, F. TEKNIK UNDIP (diunduh dari

- eprints.undip.ac.id* tanggal  
2/12/2013)
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri. 1982. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Sudikin & Damai Darmadi. 2009. *Administrasi Publik*. Jogjakarta: Laksbang PRESSindo
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Syakrani dan Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Waldo, Dwight. 1982. *Pengantar Studi Public Administration*. Jakarta: Aksara Baru
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031